



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1381/M.SM.04.00/2021 tanggal 10 Desember 2021 perihal Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);



#### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan meliputi:
  - a. rekapitulasi Kelas Jabatan dan persediaan Pegawai;
  - b. daftar nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan persediaan Pegawai;
  - c. daftar nama Jabatan Fungsional dan jabatan lainnya, Kelas Jabatan, dan persediaan pegawai;
  - d. hasil evaluasi Jabatan Struktural;
  - e. hasil evaluasi Jabatan Fungsional dan jabatan lainnya;
  - f. Peta Jabatan.
- (2) Ruang lingkup pengaturan Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dan/atau alih tugas dalam dan dari Jabatan Administrasi.
- (3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:
  - a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional;
  - b. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing;
  - c. keputusan tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui promosi;
  - d. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan Fungsional; atau
  - e. keputusan tentang perpindahan jabatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

### BAB III TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 7

Selain berhak menerima penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai juga dapat diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulannya.



#### Pasal 8

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada Pegawai berdasarkan Kelas Jabatan.
- (2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai pemberian Tunjangan Kinerja diatur tersendiri dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Perubahan terhadap Kelas Jabatan wajib dilakukan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Penghasilan dan Tunjangan Kinerja Pegawai diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal ini terhitung mulai tanggal 29 Juni 2020.



Pasal 13

Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 17 Desember 2021



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



LAMPIRAN I  
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
KETAHANAN NASIONAL  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1.	17	1
2.	16	9
3.	15	17
4.	14	0
5.	13	49
6.	12	1
7.	11	0
8.	10	27
9.	9	1
10.	8	3
11.	7	40
12.	6	11
13.	5	3
14.	4	0
15.	3	0
16.	2	0
17.	1	0
<b>Jumlah</b>		162



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



LAMPIRAN II  
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN  
 DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN STRUKTURAL</b>	<b>UNIT ORGANISASI</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>PERSEDIAAN PEGAWAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Setjen Wantannas	17	1	
2	Deputi Bidang Sistem Nasional	Deputi Sisnas	16	1	
3	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara	Deputi Sisnas	15	1	
4	Analisis Kebijakan Bid. Lembaga	Deputi Sisnas	13	1	
5	Analisis Kebijakan Bid. Tata Sarana dan Prasarana	Deputi Sisnas	13	1	
6	Analisis Kebijakan Bid. Sumber Daya Manusia	Deputi Sisnas	13	1	
7	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam	Deputi Sisnas	15	1	
8	Analisis Kebijakan Bid. Geografi	Deputi Sisnas	13	1	
9	Analisis Kebijakan Bid. Demografi	Deputi Sisnas	13	1	
10	Analisis Kebijakan Bid. Sumber Daya Alam	Deputi Sisnas	13	1	
11	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial	Deputi Sisnas	15	1	
12	Analisis Kebijakan Bid. Politik dan Keamanan	Deputi Sisnas	13	1	
13	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Ekonomi	Deputi Sisnas	13	1	
14	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya	Deputi Sisnas	13	1	
15	Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data	Deputi Sisnas	15	1	
16	Analisis Kebijakan Bid. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	Deputi Sisnas	13	1	
17	Analisis Kebijakan Bid. Telematika	Deputi Sisnas	13	1	
18	Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Deputi Jiandra	16	1	



1	2	3	4	5	6
19	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional	Deputi Jiandra	15	1	
20	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Nasional	Deputi Jiandra	13	1	
21	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Nasional	Deputi Jiandra	13	1	
22	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Nasional	Deputi Jiandra	13	1	
23	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional	Deputi Jiandra	15	1	
24	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Regional	Deputi Jiandra	13	1	
25	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Regional	Deputi Jiandra	13	1	
26	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Regional	Deputi Jiandra	13	1	
27	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional	Deputi Jiandra	15	1	
28	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Internasional	Deputi Jiandra	13	1	
29	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Internasional	Deputi Jiandra	13	1	
30	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Internasional	Deputi Jiandra	13	1	
31	Deputi Bidang Politik dan Strategi	Deputi Polstra	16	1	
32	Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional	Deputi Polstra	15	1	
33	Analisis Kebijakan Bid. Pullahta Politik Nasional	Deputi Polstra	13	1	
34	Analisis Kebijakan Bid. Perumusan Pengkajian Politik Nasional	Deputi Polstra	13	1	
35	Analisis Kebijakan Bid. Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional	Deputi Polstra	13	1	
36	Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional	Deputi Polstra	15	1	
37	Analisis Kebijakan Bid. Renstra Bangnas Kajang	Deputi Polstra	13	1	
38	Analisis Kebijakan Bid. Renbangnas Kadang/Kadek	Deputi Polstra	13	1	



1	2	3	4	5	6
39	Analisis Kebijakan Bid. Evarisk Pembangunan Nasional	Deputi Polstra	13	1	
40	Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi	Deputi Polstra	15	1	
41	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Politik dan Keamanan	Deputi Polstra	13	1	
42	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Ekonomi	Deputi Polstra	13	1	
43	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Sosial Budaya	Deputi Polstra	13	1	
44	Deputi Bidang Pengembangan	Deputi Pengembangan	16	1	
45	Pembantu Deputi Urusan Ekonomi	Deputi Pengembangan	15	1	
46	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Keuangan dan Moneter	Deputi Pengembangan	13	1	
47	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Sektor Riil	Deputi Pengembangan	13	1	
48	Analisis Kebijakan Bid. Jasa dan Pengembangan Pariwisata	Deputi Pengembangan	13	1	
49	Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya	Deputi Pengembangan	15	1	
50	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Pendidikan	Deputi Pengembangan	13	1	
51	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Keagamaan	Deputi Pengembangan	13	1	
52	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Deputi Pengembangan	13	1	
53	Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan	Deputi Pengembangan	15	1	
54	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Hukum	Deputi Pengembangan	13	1	
55	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Perundang-undangan	Deputi Pengembangan	13	1	
56	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Penegakan Hukum	Deputi Pengembangan	13	1	



1	2	3	4	5	6
57	Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan	Deputi Pengembangan	15	1	
58	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Bela Negara	Deputi Pengembangan	13	1	
59	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Militer dan Kepolisian	Deputi Pengembangan	13	1	
60	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi	Deputi Pengembangan	13	1	
61	Kepala Biro Umum	Biro Umum	15	1	
62	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Biro POK	15	1	
63	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal	Biro PSP	15	1	
64	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	Bagian Tata Usaha dan Protokol	13	1	
65	Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum	Bagian Kepegawaian dan Hukum	13	1	
66	Kepala Bagian Perlengkapan	Bagian Perlengkapan	12	1	
67	Kepala Bagian Perencanaan	Bagian Perencanaan	13	1	
68	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	1	
69	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	13	1	
70	Kepala Bagian Persidangan dan Humas	Bagian Persidangan dan Humas	13	1	
71	Kepala Bagian Sistem Informasi	Bagian Sistem Informasi	13	1	
72	Kepala Bagian Pengawasan Internal	Bagian Pengawasan Internal	13	1	
73	Kepala Subbagian Persuratan	Subbagian Persuratan	10	1	
74	Kepala Subbagian Kearsipan	Subbagian Kearsipan	10	1	
75	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan	Subbagian Protokol dan Pengamanan	10	1	
76	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Biro Umum	9	1	
77	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sistem Nasional	Subbagian Tata Usaha Desisnas	10	1	
78	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Subbagian Tata Usaha Dejiandra	10	1	



1	2	3	4	5	6
79	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik dan Strategi	Subbagian Tata Usaha Depolstra	10	1	
80	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan	Subbagian Tata Usaha Debang	10	1	
81	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	Subbagian Tata Usaha Sahli	10	1	
82	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian	Subbagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian	10	1	
83	Kepala Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai	Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai	10	1	
84	Kepala Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	10	1	
85	Kepala Subbagian Pengadaan	Subbagian Pengadaan	10	1	
86	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Subbagian Rumah Tangga	10	1	
87	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	Subbagian BMN	10	1	
88	Kepala Subbagian Rencana Program dan Kinerja	Subbagian Renprogkin	10	1	
89	Kepala Subbagian Rencana Anggaran	Subbagian Rengar	10	1	
90	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Evalap	10	1	
91	Kepala Subbagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Subbagian Organisasi dan Fasilitasi RB	10	1	
92	Kepala Subbagian Tata Laksana	Subbagian Tata Laksana	10	0	
93	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Subbagian Perbendaharaan	10	1	
94	Kepala Subbagian Verifikasi	Subbagian Verifikasi	10	1	
95	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	10	1	
96	Kepala Subbagian Pelayanan Persidangan	Subbagian Pelayanan Persidangan	10	1	
97	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga	Subbagian Hubungan Antar Lembaga	10	1	
98	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Publikasi	Subbagian Hubungan Media dan Publikasi	10	1	
99	Kepala Subbagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan	Subbagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan	10	1	
100	Kepala Subbagian Teknologi Informasi	Subbagian Teknologi Informasi	10	1	
101	Kepala Subbagian Data dan Keamanan Informasi	Subbagian Data dan Keamanan Informasi	10	1	



1	2	3	4	5	6
102	Kepala Subbagian Tata Usaha Pengawasan Internal	Subbagian Tata Usaha Pengawasan Internal	10	0	
<b>Jumlah</b>				100	



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
HARJO SUSMORO



LAMPIRAN III  
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**DAFTAR NAMA JABATAN FUNSIONAL DAN JABATAN LAINNYA,  
 KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi	Sekretariat Jenderal	16	1	
2	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya	Sekretariat Jenderal	16	1	
3	Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan	Sekretariat Jenderal	16	1	
4	Staf Ahli Bidang Hukum	Sekretariat Jenderal	16	1	
5	Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Sekretariat Jenderal	16	1	
6	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	8	0	
7	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	7	0	
8	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	0	
9	Pengelola Tata Naskah	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	0	
10	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	0	
11	Sekretaris	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	0	
12	Pengadministrasian Persuratan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	5	1	
13	Petugas Penggandaan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	5	0	
14	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	8	0	
15	Penyuluh Kearsipan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	7	1	
16	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	0	
17	Pranata Reproduksi Arsip	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	0	
18	Pranata Restorasi Arsip	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	0	
19	Pranata Kearsipan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	0	



1	2	3	4	5	6
20	Pengadministrasi Persuratan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	5	0	
21	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	8	0	
22	Analisis Persandian	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	7	2	
23	Petugas Protokol	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	0	
24	Pranata Acara	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	0	
25	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	0	
26	Komandan Petugas Keamanan	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	5	0	
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	5	0	
28	Petugas Keamanan	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	3	0	
29	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	8	0	
30	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	7	2	
31	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	6	0	
32	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	5	0	
33	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	3	0	
34	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	8	0	
35	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	7	0	
36	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	6	2	
37	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	5	0	
38	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	3	0	
39	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	8	0	



1	2	3	4	5	6
40	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	7	1	
41	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	6	1	
42	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	5	0	
43	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	3	0	
44	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	8	0	
45	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	7	1	
46	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	6	1	
47	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	5	0	
48	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	3	0	
49	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	8	0	
50	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	7	2	
51	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	6	0	
52	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	5	0	
53	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	8	0	
54	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	7	2	
55	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	7	0	
56	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	0	
57	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	0	
58	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	0	



1	2	3	4	5	6
59	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	5	0	
60	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	8	0	
61	Dokter Pertama	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	9	0	
62	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	0	
63	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	0	
64	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	0	
65	Pengelola Keperawatan	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	0	
66	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	0	
67	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	0	
68	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	8	0	
69	Analisis Produk Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	2	
70	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	0	
71	Analisis Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	1	
72	Pengelola Informasi Produk Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	6	0	
73	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	8	0	
74	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	7	1	



1	2	3	4	5	6
75	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	7	0	
76	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	6	1	
77	Pranata Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	6	0	
78	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	5	0	
79	Arsiparis Pertama	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	8	0	
80	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	7	1	
81	Sekretaris	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	0	
82	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	0	
83	Pengelola Keuangan	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	0	
84	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	5	0	
85	Pengemudi	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	3	0	
86	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	8	0	
87	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	7	0	
88	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	6	0	
89	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	5	2	
90	Teknisi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	5	0	
91	Pengemudi	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	3	0	
92	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian BMN, Biro Umum	8	0	
93	Analisis Barang Milik Negara	Sub Bagian BMN, Biro Umum	7	2	
94	Teknisi Elektronik	Sub Bagian BMN, Biro Umum	6	0	
95	Pengelola Gudang	Sub Bagian BMN, Biro Umum	6	0	
96	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian BMN, Biro Umum	5	0	
97	Perencana Pertama	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	8	0	
98	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	1	



1	2	3	4	5	6
99	Analisis Kinerja	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	1	
100	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	0	
101	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	0	
102	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	5	0	
103	Analisis Anggaran Pertama	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	8	0	
104	Analisis Perencanaan Anggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	0	
105	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	0	
106	Analisis Penganggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	0	
107	Pengelola Bahan Perencanaan	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	6	0	
108	Perencana Pertama	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	8	0	
109	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	0	
120	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	2	
121	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	0	
122	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	0	
123	Analisis Kebijakan Pertama	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	8	0	
124	Analisis Organisasi	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	1	
125	Analisis Manajemen Perkantoran	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	1	
126	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	1	
127	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	6	0	
128	Analisis Kebijakan Pertama	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitasi RB, Biro POK	8	0	



1	2	3	4	5	6
129	Analisis Kinerja	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	7	0	
130	Analisis Kelembagaan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	7	1	
131	Pengolah Data Kelembagaan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	6	0	
132	Pengadministrasian Pemerintahan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	5	0	
133	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	8	0	
134	Pemeriksaan Laporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	1	
135	Analisis Sistem Akuntansi Pusat	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	0	
136	Penata Laporan Keuangan	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	0	
137	Pengelola Akuntansi	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	6	0	
138	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	8	0	
139	Analisis Transaksi Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	7	2	
140	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	7	0	
141	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	1	
142	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	0	
143	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	0	
144	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	8	0	
145	Analisis Perbendaharaan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	1	
146	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	1	
147	Penata Keuangan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	1	



1	2	3	4	5	6
148	Bendahara	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	1	
149	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	5	0	
150	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	8	0	
151	Penyusun Risalah	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	0	
152	Analisis Materi Sidang	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	0	
153	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	0	
154	Pengelola Persidangan	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	6	0	
155	Notulis Rapat	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	6	0	
156	Pengadministrasi Rapat	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	5	0	
157	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	8	0	
158	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	1	
159	Analisis Kerja Sama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	0	
160	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	0	
161	Pengelola Informasi Kerjasama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	6	0	
162	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	8	0	
163	Analisis Publikasi	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	1	
164	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	0	
165	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	0	
166	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	6	0	
167	Sekretaris	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	6	0	



1	2	3	4	5	6
168	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	5	0	
169	Pustakawan Pertama	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	8	0	
170	Penata Liputan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	0	
171	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	7	0	
172	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	7	0	
173	Pustakawan Pelaksana	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	0	
174	Pengelola Perpustakaan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	0	
175	Pengadministrasi Risalah	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	5	0	
176	Petugas Penggandaan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	5	0	
177	Pranata Komputer Pertama	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	8	0	
178	Analisis Sistem Informasi	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	7	1	
179	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	7	0	
180	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	6	1	
181	Pranata Komputer Pelaksana	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	6	1	
<b>Jumlah</b>				57	



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan	FAKTOR 1 Ruang Lingkup dan Dampak Program (Level 1-5)		FAKTOR 2 Pengaturan Organisasi (Level 1-3)		FAKTOR 3 Wewenang Penyeliaan dan Manajerial (Level 1-3)		FAKTOR 4 Hubungan Personal				FAKTOR 5 Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan (Level 1-8)		FAKTOR 6 Kondisi Lain (Level 1-6)			
					4	5	3	3	3	4	4A Sifat Hubungan (Level 1-4)	4B Tujuan Hubungan (Level 1-4)	6	8	5	6				
1	2	3	4	5	6		7		8		9				10		11		12	
1	Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	Setjen Wantannas	17	4275	4	775	3	350	3	900	4	100	4	125	6	800	5	1225		
2	Deputi Bidang Sistem Nasional	Deputi Sisnas	16	3870	4	775	2	250	3	900	4	100	2	75	5	650	4	1120		
3	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara	Deputi Sisnas	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975		
4	Analisis Kebijakan Bid. Lembaga	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575		
5	Analisis Kebijakan Bid. Tata Sarana dan Prasarana	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575		

6. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
6	Analisis Kebijakan Bid. Sumber Daya Manusia	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
7	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam	Deputi Sisnas	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
8	Analisis Kebijakan Bid. Geografi	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
9	Analisis Kebijakan Bid. Demografi	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
10	Analisis Kebijakan Bid. Sumber Daya Alam	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
11	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial	Deputi Sisnas	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
12	Analisis Kebijakan Bid. Politik dan Keamanan	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
13	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Ekonomi	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
14	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
15	Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data	Deputi Sisnas	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
16	Analisis Kebijakan Bid. Pengumpulan dan Pengolahan Informasi	Deputi Sisnas	13	2440	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

17. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
17	Analisis Kebijakan Bid. Telematika	Deputi Sisnas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
18	Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Deputi Jiandra	16	3870	4	775	2	250	3	900	4	100	2	75	5	650	4	1120
19	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional	Deputi Jiandra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
20	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Nasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
21	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Nasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
22	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Nasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
23	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Regional	Deputi Jiandra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
24	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Regional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
25	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Regional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
26	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Regional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
27	Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Internasional	Deputi Jiandra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975

28. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
28	Analisis Kebijakan Bid. Politik Keamanan Internasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
29	Analisis Kebijakan Bid. Ekonomi Internasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
30	Analisis Kebijakan Bid. Sosial Budaya Internasional	Deputi Jiandra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
31	Deputi Bidang Politik dan Strategi	Deputi Polstra	16	3870	4	775	2	250	3	900	4	100	2	75	5	650	4	1120
32	Pembantu Deputi Urusan Politik Nasional	Deputi Polstra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
33	Analisis Kebijakan Bid. Pullahta Politik Nasional	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
34	Analisis Kebijakan Bid. Perumusan Pengkajian Politik Nasional	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
35	Analisis Kebijakan Bid. Monitoring dan Evaluasi Politik Nasional	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
36	Pembantu Deputi Urusan Strategi Nasional	Deputi Polstra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
37	Analisis Kebijakan Bid. Renstra Bangnas Kajang	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

38. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
38	Analisis Kebijakan Bid. Renbangnas Kadang/Kadek	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
39	Analisis Kebijakan Bid. Evarisk Pembangunan Nasional	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
40	Pembantu Deputi Urusan Perencanaan Kontijensi	Deputi Polstra	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
41	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Politik dan Keamanan	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
42	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Ekonomi	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
43	Analisis Kebijakan Bid. Renc. Kontijensi Sosial Budaya	Deputi Polstra	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
44	Deputi Bidang Pengembangan	Deputi Pengembangan	16	3870	4	775	2	250	3	900	4	100	2	75	5	650	4	1120
45	Pembantu Deputi Urusan Ekonomi	Deputi Pengembangan	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
46	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Keuangan dan Moneter	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
47	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Sektor Riiil	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

48. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
48	Analisis Kebijakan Bid. Jasa dan Pengembangan Pariwisata	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
49	Pembantu Deputi Urusan Sosial Budaya	Deputi Pengembangan	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
50	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Pendidikan	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
51	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Keagamaan	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
52	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Kesejahteraan Sosial	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
53	Pembantu Deputi Urusan Hukum dan Perundang-Undangan	Deputi Pengembangan	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
54	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Hukum	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
55	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Perundang-undangan	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
56	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Penegakan Hukum	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

57. Pembantu . . .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
57	Pembantu Deputi Urusan Pertahanan Keamanan	Deputi Pengembangan	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
58	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Bela Negara	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
59	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Militer dan Kepolisian	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
60	Analisis Kebijakan Bid. Pengembangan Mobilisasi dan Demobilisasi	Deputi Pengembangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
61	Kepala Biro Umum	Biro Umum	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
62	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Biro POK	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
63	Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal	Biro PSP	15	3230	3	550	2	250	2	775	3	75	3	100	4	505	3	975
64	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol	Bagian Tata Usaha dan Protokol	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
65	Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum	Bagian Kepegawaian dan Hukum	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
66	Kepala Bagian Perlengkapan	Bagian Perlengkapan	12	2280	1	175	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575

67. Kepala . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
67	Kepala Bagian Perencanaan	Bagian Perencanaan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
68	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
69	Kepala Bagian Keuangan	Bagian Keuangan	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
70	Kepala Bagian Persidangan dan Humas	Bagian Persidangan dan Humas	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
71	Kepala Bagian Sistem Informasi	Bagian Sistem Informasi	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
72	Kepala Bagian Pengawasan Internal	Bagian Pengawasan Internal	13	2455	2	350	1	100	2	775	3	75	2	75	4	505	2	575
73	Kepala Subbagian Persuratan	Subbagian Persuratan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
74	Kepala Subbagian Kearsipan	Subbagian Kearsipan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
75	Kepala Subbagian Protokol dan Pengamanan	Subbagian Protokol dan Pengamanan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
76	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	Biro Umum	9	1430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
77	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sistem Nasional	Subbagian Tata Usaha Desisnas	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
78	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengkajian dan Penginderaan	Subbagian Tata Usaha Dejiandra	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

79. Kepala . . .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
79	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Politik dan Strategi	Subbagian Tata Usaha Depolstra	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
80	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan	Subbagian Tata Usaha Debang	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
81	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	Subbagian Tata Usaha Sahli	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
82	Kepala Subbagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian	Subbagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
83	Kepala Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai	Subbagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
84	Kepala Subbagian Hukum	Subbagian Hukum	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
85	Kepala Subbagian Pengadaan	Subbagian Pengadaan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
86	Kepala Subbagian Rumah Tangga	Subbagian Rumah Tangga	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
87	Kepala Subbagian Barang Milik Negara	Subbagian BMN	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
88	Kepala Subbagian Rencana Program dan Kinerja	Subbagian Renprogkin	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
89	Kepala Subbagian Rencana Anggaran	Subbagian Rengar	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

90. Kepala . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
90	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Evalap	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
91	Kepala Subbagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	Subbagian Organisasi dan Fasilitasi RB	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
92	Kepala Subbagian Tata Laksana	Subbagian Tata Laksana	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
93	Kepala Subbagian Perbendaharaan	Subbagian Perbendaharaan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
94	Kepala Subbagian Verifikasi	Subbagian Verifikasi	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
95	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
96	Kepala Subbagian Pelayanan Persidangan	Subbagian Pelayanan Persidangan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
97	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga	Subbagian Hubungan Antar Lembaga	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
98	Kepala Subbagian Hubungan Media dan Publikasi	Subbagian Hubungan Media dan Publikasi	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
99	Kepala Subbagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan	Subbagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
100	Kepala Subbagian Teknologi Informasi	Subbagian Teknologi Informasi	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575

101. Kepala . . .



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
101	Kepala Subbagian Data dan Keamanan Informasi	Subbagian Data dan Keamanan Informasi	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575
102	Kepala Subbagian Tata Usaha Pengawasan Internal	Subbagian Tata Usaha Pengawasan Internal	10	1695	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	2	575



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

HARJO SUSMORO



LAMPIRAN V  
 PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN  
 KETAHANAN NASIONAL  
 NOMOR 7 TAHUN 2021  
 TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL

**TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

No	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Harga Jabatan	Faktor 1 Pengetahuan (Level 1~9)		Faktor 2 Pengawasan (Level 1~5)		Faktor 3 Pedoman (Level 1~5)		Faktor 4 Kompleksitas (Level 1~6)		Faktor 5 Ruang Lingkup dan Pengaruh (Level 1~6)		Faktor 6 Hubungan Pribadi (Level 1~4)		Faktor 7 Tujuan Hubungan (Level 1~4)		Faktor 8 Tuntutan Fisik (Level 1~3)		Faktor 9 Lingkungan Kerja (Level 1~3)	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14									
1	Staf Ahli Bidang Ekonomi	Sekretariat Jenderal	16	3.665	7	1.250	5	650	5	650	6	450	5	325	4	110	4	220	1	5	1	5
2	Staf Ahli Bidang Sosial Budaya	Sekretariat Jenderal	16	3.665	7	1.250	5	650	5	650	6	450	5	325	4	110	4	220	1	5	1	5
3	Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan	Sekretariat Jenderal	16	3.665	7	1.250	5	650	5	650	6	450	5	325	4	110	4	220	1	5	1	5
4	Staf Ahli Bidang Hukum	Sekretariat Jenderal	16	3.665	7	1.250	5	650	5	650	6	450	5	325	4	110	4	220	1	5	1	5
5	Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Sekretariat Jenderal	16	3.665	7	1.250	5	650	5	650	6	450	5	325	4	110	4	220	1	5	1	5
6	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
7	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

8. Pengelola . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
8	Pengelola Administrasi Pemerintahan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
9	Pengelola Tata Naskah	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
10	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
11	Sekretaris	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
12	Pengadministrasi Persuratan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
13	Petugas Penggandaan	Sub Bagian Persuratan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
14	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
15	Penyuluh Kearsipan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
16	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
17	Pranata Reproduksi Arsip	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
18	Pranata Restorasi Arsip	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
19	Pranata Kearsipan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

20. Pengadministrasi . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
20	Pengadministrasi Persuratan	Sub Bagian Kearsipan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
21	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
22	Analisis Persandian	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
23	Petugas Protokol	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
24	Pranata Acara	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
25	Operator Sandi dan Telekomunikasi	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
26	Komandan Petugas Keamanan	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
27	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
28	Petugas Keamanan	Sub Bagian Protokol dan Pengamanan, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

29. Arsiparis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
29	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
30	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
31	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
32	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
33	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Desisnas, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
34	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
35	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
36	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
37	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
38	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Dejiandra, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

39. Arsiparis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
39	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
40	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
41	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
42	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
43	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Debang, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
44	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
45	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
46	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
47	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
48	Pengemudi	Sub Bagian Tata Usaha Depolstra, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

49. Arsiparis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
49	Arsiparis Pertama	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
50	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
51	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
52	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
53	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
54	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
55	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
56	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

57. Pengelola . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
57	Pengelola Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
58	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
59	Pengadministrasi Kepegawaian	Sub Bagian Mutasi Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
60	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
61	Dokter Pertama	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	9	1.570	6	950	2	125	2	125	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	2	20
62	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

63. Pranata . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
63	Pranata SDM Aparatur Mahir	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
64	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
65	Pengelola Keperawatan	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
66	Pranata SDM Aparatur Terampil	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	840	4	550	2	125	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
67	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian Disiplin dan Pengembangan Pegawai, Biro Umum	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
68	Analisis SDM Aparatur Pertama	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
69	Analisis Produk Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
70	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

71. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
71	Analisis Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
72	Pengelola Informasi Produk Hukum	Sub Bagian Hukum, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
73	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
74	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
75	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
76	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
77	Pranata Barang dan Jasa	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
78	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Pengadaan, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
79	Arsiparis Pertama	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
80	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
81	Sekretaris	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

82. Arsiparis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
82	Arsiparis Pelaksana	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
83	Pengelola Keuangan	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
84	Pengadministrasi Umum	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
85	Pengemudi	Sub Bagian TU Sesjen, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
86	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
87	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
88	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
89	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
90	Teknisi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
91	Pengemudi	Sub Bagian Rumah Tangga, Biro Umum	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

92. Pengelola . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
92	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Sub Bagian BMN, Biro Umum	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
93	Analisis Barang Milik Negara	Sub Bagian BMN, Biro Umum	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
94	Teknisi Elektronik	Sub Bagian BMN, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
95	Pengelola Gudang	Sub Bagian BMN, Biro Umum	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
96	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Sub Bagian BMN, Biro Umum	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
97	Perencana Pertama	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
98	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
99	Analisis Kinerja	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
100	Analisis Perencanaan	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

101. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
101	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
102	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	Sub Bagian Rencana Program dan Kinerja, Biro POK	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
103	Analisis Anggaran Pertama	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	8	1.205	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
104	Analisis Perencanaan Anggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
105	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
106	Analisis Penganggaran	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
107	Pengelola Bahan Perencanaan	Sub Bagian Rencana Anggaran, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
108	Perencana Pertama	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

109. Pengevaluasi . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
109	Pengevaluasi Program dan Kinerja	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
110	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
111	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
112	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
113	Analisis Kebijakan Pertama	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
114	Analisis Organisasi	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
115	Analisis Manajemen Perkantoran	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
116	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
117	Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana	Sub Bagian Tata Laksana, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
118	Analisis Kebijakan Pertama	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

119. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
119	Analisis Kinerja	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
120	Analisis Kelembagaan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
121	Pengolah Data Kelembagaan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
122	Pengadministrasian Pemerintahan	Sub Bagian Organisasi dan Fasilitas RB, Biro POK	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
123	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
124	Pemeriksaan Laporan dan Transaksi Keuangan	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
125	Analisis Sistem Akuntansi Pusat	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
126	Penata Laporan Keuangan	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
127	Pengelola Akuntansi	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

128. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
128	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
129	Analisis Transaksi Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
130	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
131	Pengelola Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
132	Verifikator Keuangan	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
133	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Sub Bagian Verifikasi, Biro POK	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
134	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	8	1.270	5	750	2	125	2	125	2	75	2	75	3	60	2	50	1	5	1	5
135	Analisis Perbendaharaan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
136	Analisis Sistem Informasi Perbendaharaan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
137	Penata Keuangan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
138	Bendahara	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	7	890	4	550	2	125	1	25	2	75	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5

139. Pengadministrasi . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
139	Pengadministrasi Keuangan	Sub Bagian Perbendaharaan, Biro POK	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
140	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
141	Penyusun Risalah	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
142	Analisis Materi Sidang	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
143	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
145	Pengelola Persidangan	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
146	Notulis Rapat	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
147	Pengadministrasi Rapat	Sub Bagian Pelayanan Sidang, Biro PSP	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
148	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
149	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
150	Analisis Kerja Sama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

151. Analisis . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
151	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
152	Pengelola Informasi Kerjasama	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
153	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
154	Analisis Publikasi	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
155	Analisis Tata Usaha	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
156	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
157	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

158. Sekretaris . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
158	Sekretaris	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
159	Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media	Sub Bagian Hubungan Media dan Publikasi, Biro PSP	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
160	Pustakawan Pertama	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
161	Penata Liputan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
162	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
163	Penyusun Dokumentasi Kesenian dan Perfilman	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

164. Pustakawan . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
164	Pustakawan Pelaksana	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1	5
165	Pengelola Perpustakaan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
166	Pengadministrasi Risalah	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
167	Petugas Penggandaan	Sub Bagian Produksi, Dokumentasi dan Perpustakaan, Biro PSP	5	490	3	350	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
168	Pranata Komputer Pertama	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
169	Analisis Sistem Informasi	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
170	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

171. Pengelola . . .



1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
171	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
172	Pranata Komputer Pelaksana	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
173	Pengolah Data	Sub Bagian Data dan Keamanan Informasi, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
174	Pranata Komputer Pertama	Sub Bagian Teknologi Informasi, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
175	Analisis Sistem Informasi	Sub Bagian Teknologi Informasi, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
176	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	Sub Bagian Teknologi Informasi, Biro PSP	7	1.005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
178	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	Sub Bagian Teknologi Informasi, Biro PSP	6	690	4	550	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
179	Pranata Komputer Pelaksana	Sub Bagian Teknologi Informasi, Biro PSP	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
180	Auditor Pertama	Bagian Pengawasan Internal, Biro PSP	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5

181. Analisis . . .



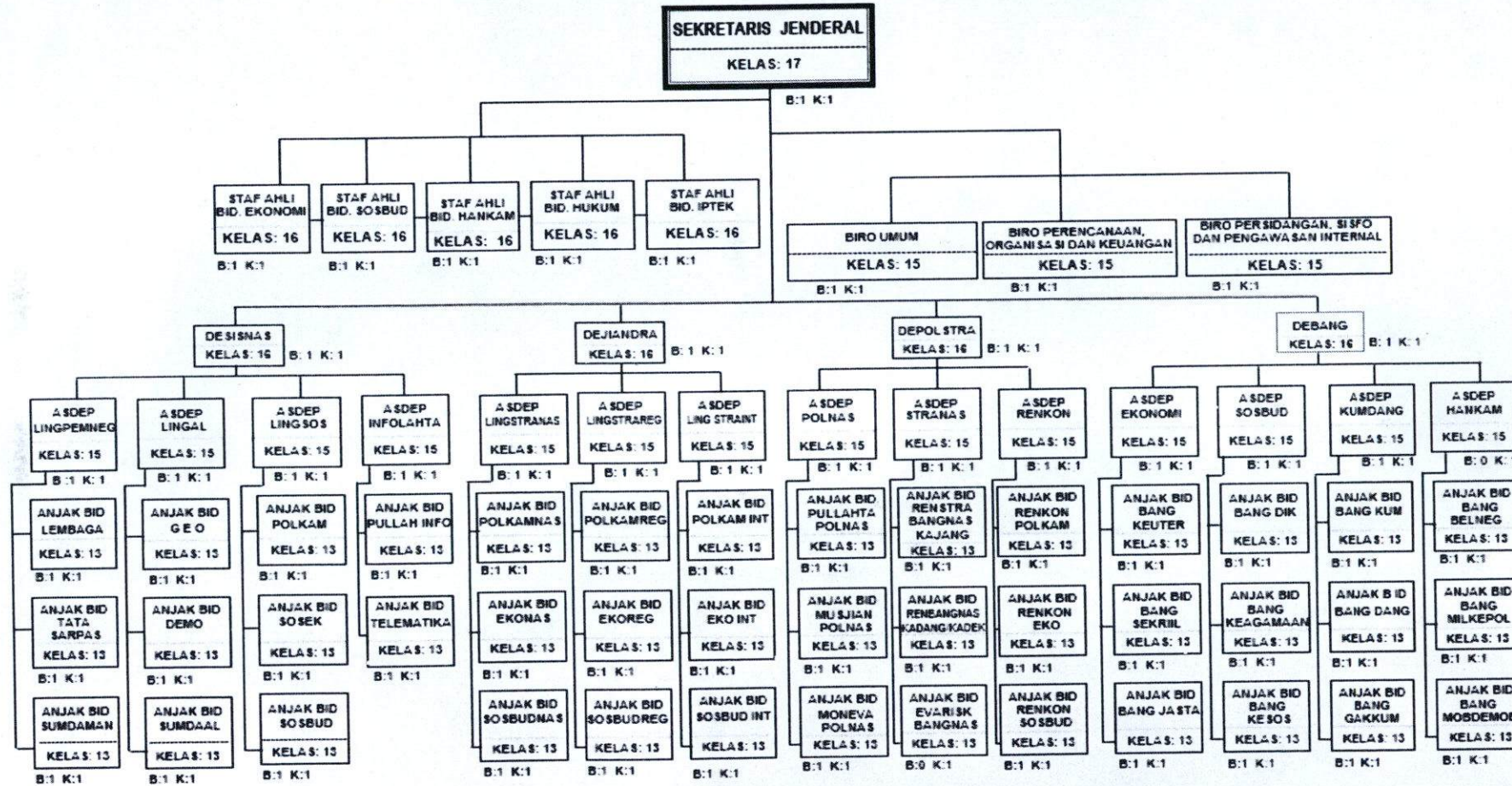
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14	
181	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	Bagian Pengawasan Internal, Biro PSP	7	890	5	750	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5

SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
  
HARJO SUSMORO



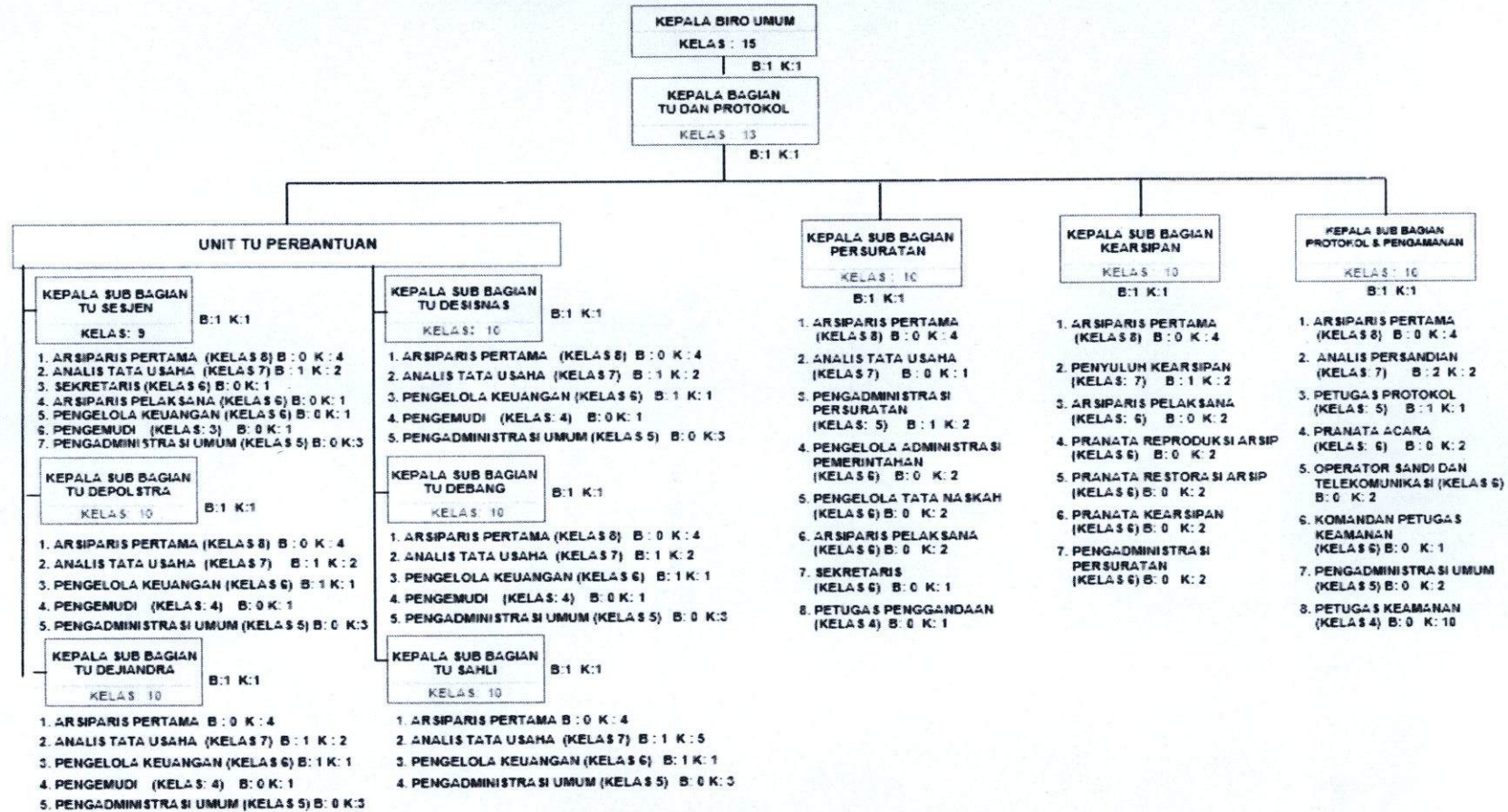


**PETA JABATAN  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL**



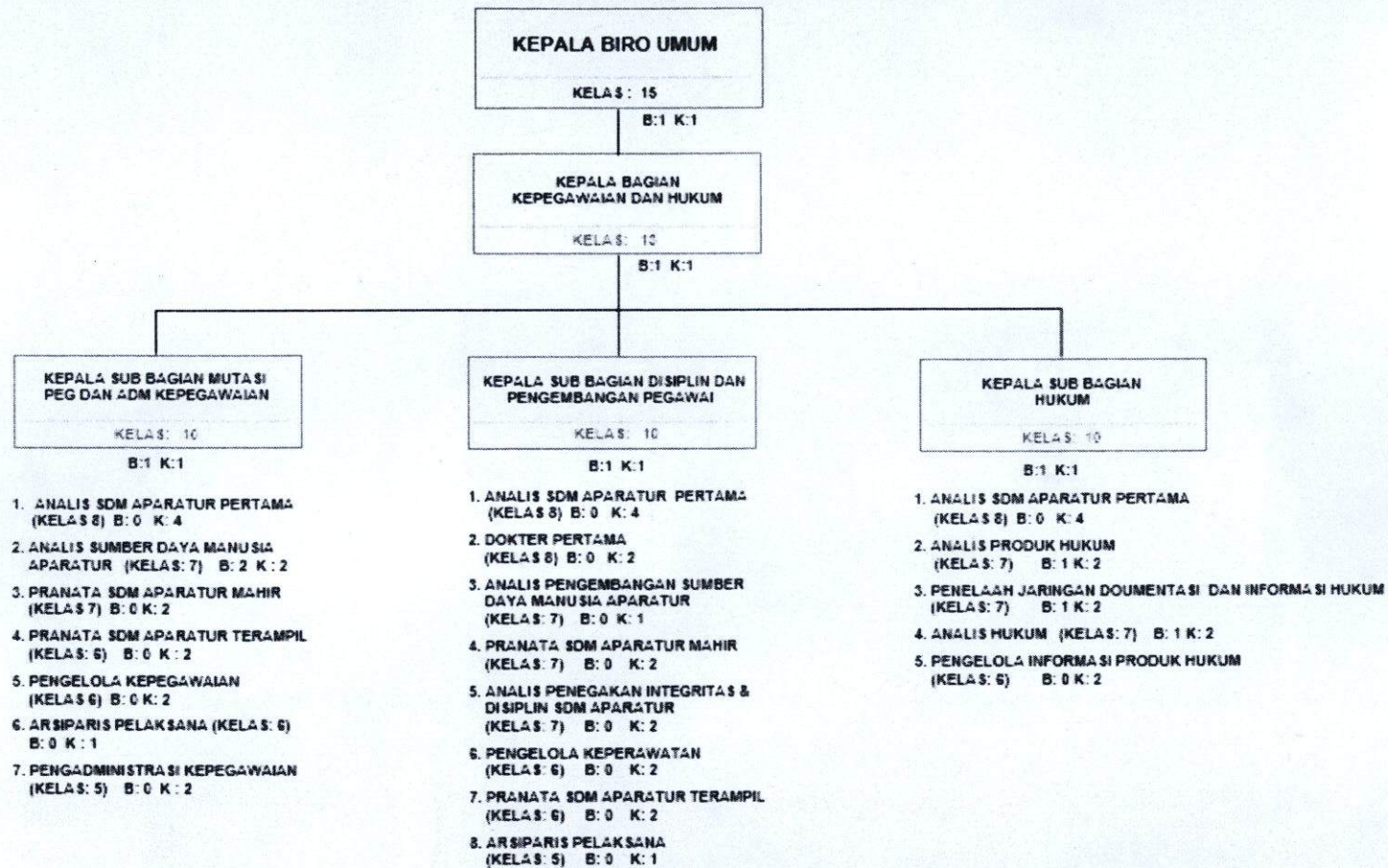


### PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM) BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL





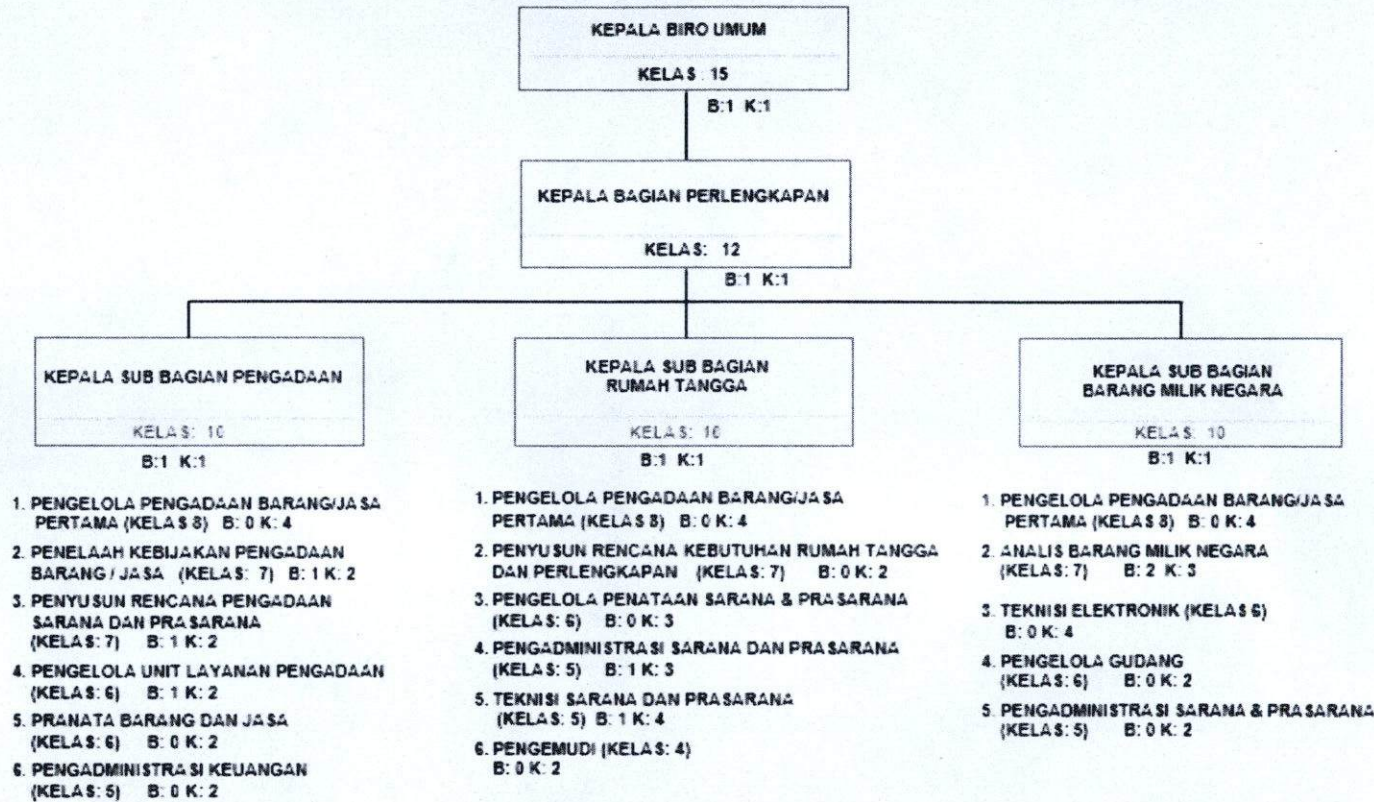
### PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM) BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN HUKUM



PETA . . .



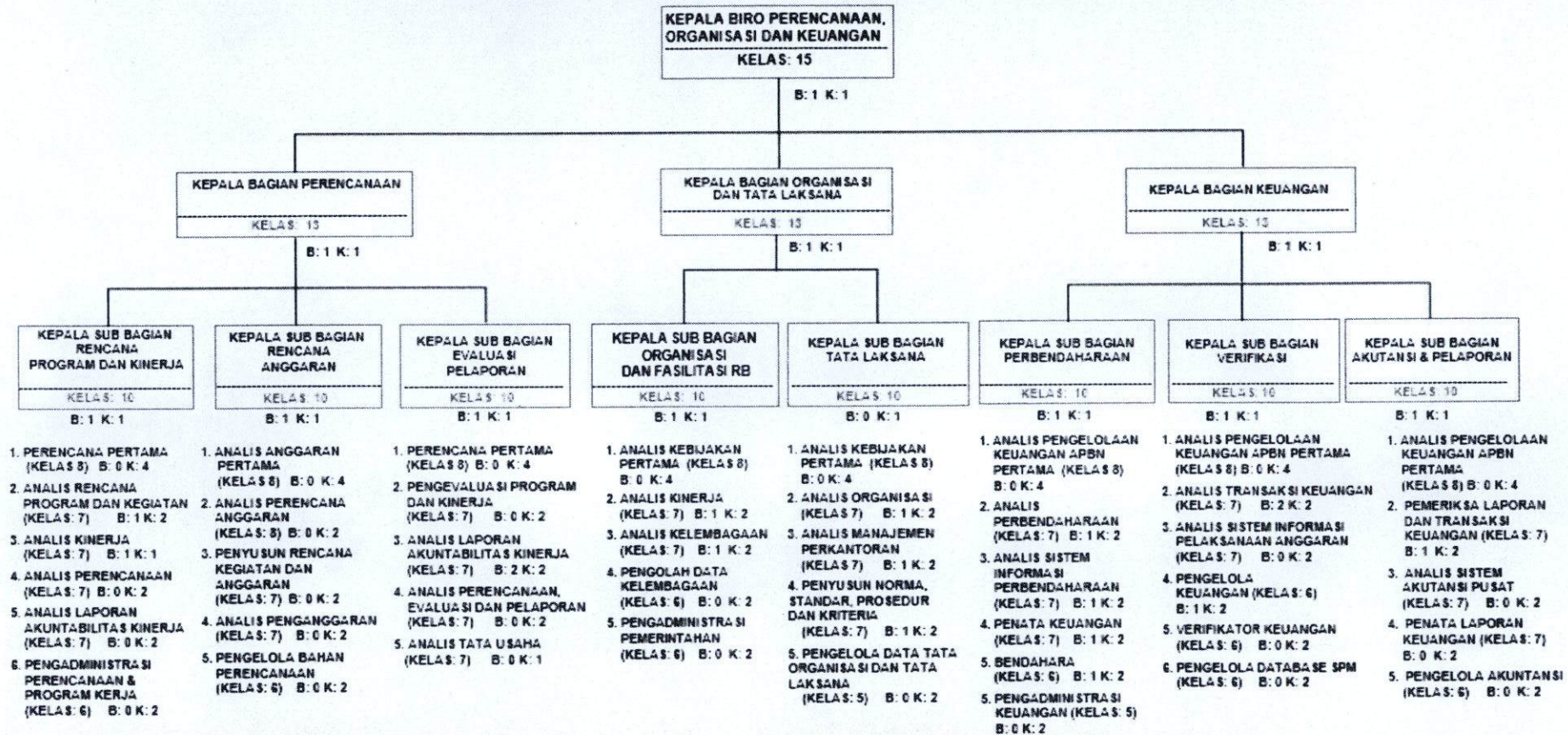
## PETA JABATAN BIRO UMUM (ROUM) BAGIAN PERLENGKAPAN



PETA . . .

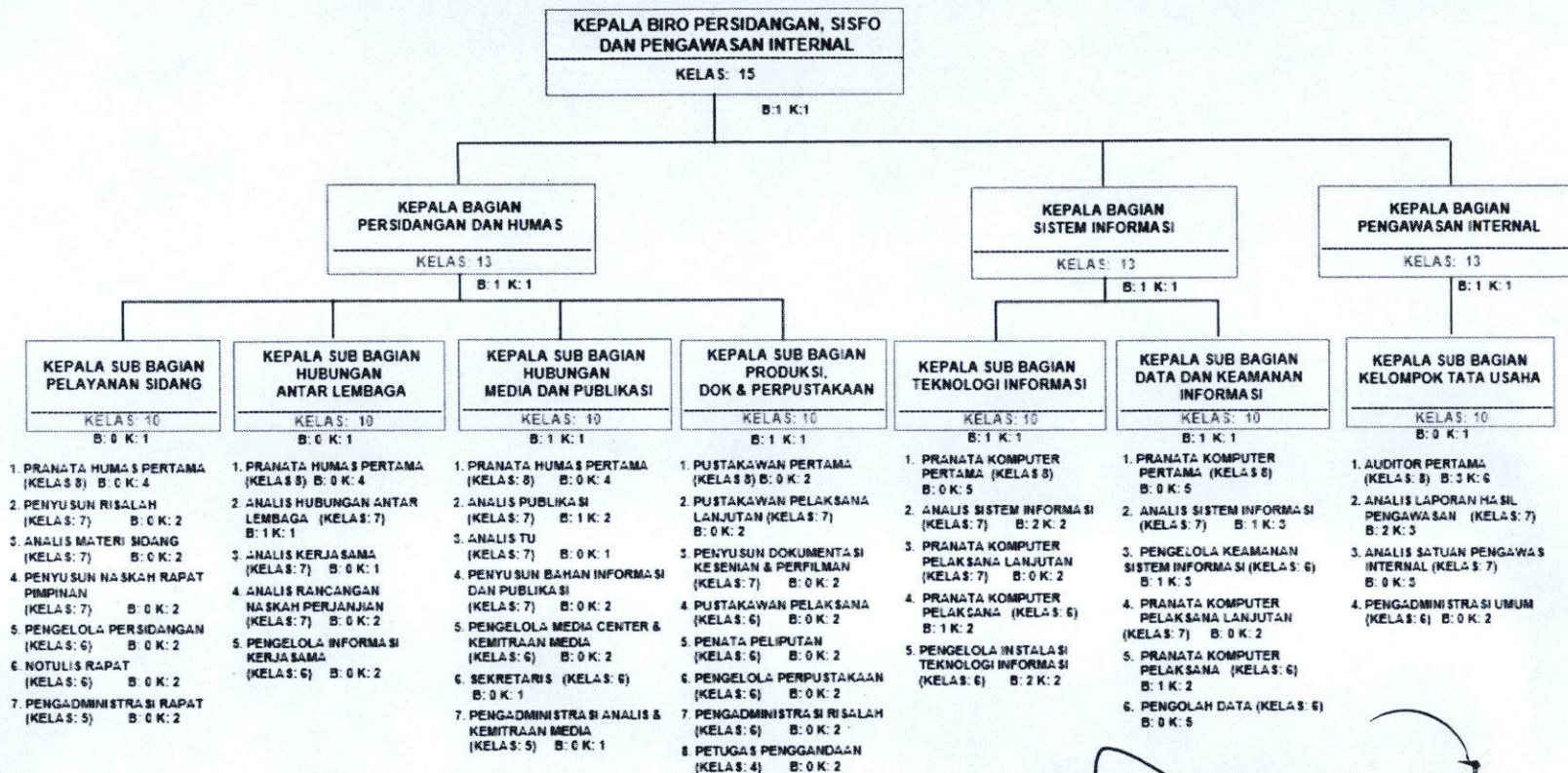


### PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KEUANGAN (ROPOK)





### PETA JABATAN BIRO PERSIDANGAN, SISFO DAN PENGAWASAN INTERNAL (ROPSP)



SEKRETARIS JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

*[Signature]*  
HARJO SUSMORO